

Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat

Alisman

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23681
alisman@utu.ac.id

Zaki Munandar

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23681
zakimunadar@gmail.com

Zulfan Yusuf

Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah
Jalan Tengku Imum lueng Bata Desa Bathoh Kota Banda Aceh Prov. Aceh - Indonesia. 23249
zulfanyusuf@serambimekkah.ac.id

Zahara

Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Almuslim
Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh
24261
zahara@almuslim.ac.id

Mira Chairani*

Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Almuslim
Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh
24261
mirachairani@almuslim.ac.id

*Corresponding Author

Article's History:

Received; 9 November 2023, Accepted in revised form; 18 November 2023; Accepted; 29 November 2023; Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Alisman., Munandar, Z., Yusuf, Z., Zahara., & Chairani, M. (2023). Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2831-2841. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1735>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Atau Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2007-2019 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Y dan Laba Penyertaan Modal pada BUMD sebagai X. Hasil pengujian secara individual menunjukkan variabel laba penyertaan modal mempunyai hubungan positif dan signifikan ($0,002 < 0,050$) atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,479 > 2,201$). Berdasarkan perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted* bernilai 0,790 dan menghasilkan R^2 (*R square*) sebesar 0,766 yang dapat diartikan bahwa 76,6 persen dapat dijelaskan oleh variabel laba penyertaan modal sedangkan sisanya sebesar 23,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian seperti investasipublik dan swasta.

Keywords: Laba Penyertaan Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendahuluan

Indonesia dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 79 menyebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang disebut PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Bayu Pratama Putra, 2015)

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Dwi Sundi Marlianti, 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan), dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mohammad, 2013).

Pemerintah daerah juga harus menjamin semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat secara rinci sehingga dapat terkelola dengan baik. Dukungan keuangan dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah dan pembangunan (Bayu Pratama Putra, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah. Semakin besar kontribusi PAD nya maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Annisya Rahmadani, 2018)

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang mana memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar dikarenakan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah sektoral yang dikelola pemerintah bersama masyarakat. Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kinerja keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan sudah mandiri. Hal ini dikarenakan beberapa tahun terakhir penerimaan PAD memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Hasanuddin, 2016).

Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat selama periode 2007 hingga 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2016

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi(Rp) |
|----|-------|----------------|----------------|
| 1 | 2007 | 21,212,667,763 | 21,710,256,581 |
| 2 | 2008 | 27,561,889,150 | 40,423,494,271 |
| 3 | 2009 | 26,909,471,261 | 27,874,493,673 |
| 4 | 2010 | 27,748,148,683 | 24,272,574,383 |
| 5 | 2011 | 33,117,259,546 | 21,042,866,954 |
| 6 | 2012 | 37,263,716,192 | 24,727,256,869 |

| | | | |
|----|------|----------------|----------------|
| 7 | 2013 | 48,329,547,197 | 46,928,106,802 |
| 8 | 2014 | 58,438,119,513 | 57,034,104,121 |
| 9 | 2015 | 29,269,645,097 | 36,794,486,818 |
| 10 | 2016 | 30,346,628,284 | 37,829,474,916 |

(Sumber : BPKD Aceh Barat)

Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007-2016 mengalami fluktuasi dimana pada tahun tersebut target dan realisasi tidak stabil atau berfluktuasi. Pada tahun 2010-2014 target dan realisasi penerimaan PAD berfluktuasi. Namun, pada tahun 2007-2009 dan 2015-2016 mengalami peningkatan yaitu melebihi yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat hampir tergalai keseluruhan serta pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat hampir mencapai angka optimal.

Besarnya potensi PAD di kabupaten Aceh Barat terlihat dari sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini pula dapat terlihat dari besarnya potensi yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat (Kendy Rama Nuzulistyan, 2015).

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satu perusahaan milik daerah yang dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi prekonomian masyarakat di daerah karena BUMD merupakan perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat dimana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah (Mandala Harefa, 2010).

Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Jika pemerintah daerah mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial (Bayu Pratama Putra, 2015). Di Kabupaten Aceh Barat penyertaan modal pemerintah pada perusahaan milik daerah hanya dilakukan pada PT. BPD Aceh Meulaboh.

PT. BPD Aceh Meulaboh adalah lembaga keuangan perbankan pertama yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam (Annual Report Bank Aceh, 2014). Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Penyertaan modal pemerintah pada Bank Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Laba Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2016

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase(%) |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2007 | 2,086,686,476 | 1,287,947,382 | 61.72 |
| 2 | 2008 | 2,324,027,562 | 1,558,645,286 | 67.07 |
| 3 | 2009 | 2,335,053,701 | 1,658,387,037 | 71.02 |
| 4 | 2010 | 2,993,230,076 | 2,993,230,076 | 100.00 |
| 5 | 2011 | 2,993,230,076 | 2,216,828,812 | 74.06 |
| 6 | 2012 | 2,522,369,293 | 2,522,369,293 | 100.00 |
| 7 | 2013 | 3,375,202,713 | 3,375,202,713 | 100.00 |
| 8 | 2014 | 3,375,202,713 | 3,687,870,750 | 109.26 |
| 9 | 2015 | 3,459,582,781 | 4,816,071,999 | 139.21 |
| 10 | 2016 | 3,972,964,726 | 4,927,684,668 | 124.03 |

(Sumber : BPKD Aceh Barat)

Pada Tabel 2 dapat kita lihat bahwa target dan realisasi laba pada BUMD Kabupaten Aceh Barat beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan di mana pada tahun 2007-2016 target selalu melebihi realisasi atau terealisasi sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah pada bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Aceh Barat hampir tergali keseluruhan serta pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat hampir mencapai angka optimal. Namun, pada tahun 2007-2009 realisasi tidak mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa dengan hasil laba BUMD yang diperoleh dapat menjadikan salah satu sumber penerimaan dan juga menjadikan peran-peran dasar pemerintah daerah dalam alokasi, distribusi dan redistribusi. Selain itu laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran sosial yang juga dituntut memaksimalkan peran sosialnya terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Selain itu, keberadaan BUMD sendiri juga bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpadu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.

Tinjauan Pustaka

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998).

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak, redistribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian, dengan modal daerah (Amaruddin, 2012).

Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).

Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- a. Meningkatkan Produksi;
- b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah Disisi lain,
BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebaskan padanya, pokoknya adalah:
 - a. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
 - b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
 - c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;

d. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik skala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Pada era otonomi daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No.13 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didalam daerah untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2008).

Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan berasal dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Mamesah, 2007).

Pendapatan daerah adalah semua pendapatan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah (Wahyu Maizal, 2014).

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponensumber penerimaan keuangan negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah didalam daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah (Wahyu Maizal, 2014).

Konsekuensi dari otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan asli daerah (Pratiwi, 2007). Pendapatan asli daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu ditingkatkan pertumbuhannya, yang tentunya ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat (Mardiasmo, 2007)

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Wahyu Maizal, 2014)

Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.

Retribusi daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan daerah yang dipisahkan

Pendapatan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).

Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, penerimaan daerah atas keterlambatan pelaksanaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggran/cicilan penjualan.

Penelitian Terdahulu

Nani Sari dkk (2012) meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Morowali Tahun 2003 – 2012. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series periode tahun 2003 sampai tahun 2012. Variabel dalam penelitian ini variabel independen berupa pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif dan produk domestik regional bruto secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel pengeluaran pembangunan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali.

Bayu Pratama Putra (2015) meneliti tentang Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu

kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba BUMD serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan laba BUMD serta pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang periode 2010-2015.

Umaruddin Usman Meneliti tentang Analisis Pengaruh Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara. Model analisis yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini diperoleh konstanta sebesar 19,651 artinya bilamana laba BUMD dianggap nol maka besar PAD Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 19,651, dan dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan pengaruh laba BUMD terhadap PAD Kabupaten Aceh utara adalah laba BUMD berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara dengan besar koefisien 0,231, artinya jika terjadi kenaikan pada laba BUMD sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap PAD sebesar 0,231 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah, dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut, namun sampai saat ini PAD Kabupaten Aceh Utara belum mampu menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan jauh dari harapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Endro Suwamo dan Suhartiningsih (2008) tentang potensi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah, Karena dengan adanya pemungutan pajak daerah pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 persen dari semester II di tahun 2007, dan pada semester II meningkat sebesar 3,82 persen dari semester I, di tahun 2009 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 3,68 persen dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 persen dari semester I, sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 persen dari semester II tahun 2009, dan semester ke-II nya meningkat sebesar 3,31 persen dari semester sebelumnya. 2) Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi yang berbeda-beda, dari tujuh pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo pos pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pos pajak parkir adalah pos pajak yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo dimana masing-masing pos memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,07 persen, disusul pos pajak hotel sebesar 0,184 persen, pajak hiburan sebesar 0,186 persen, pajak restoran sebesar 1,112 persen, pajak reklame sebesar 4,966 persen, dan pos pajak daerah yang paling banyak memberikan kontribusinya adalah pos pajak penerangan jalan yaitu sebesar 61,808 persen.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah dan laba penyertaan modal pada Bidang Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kurun waktu dari tahun 2007-2019 dan penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah dan penyertaan modal yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian dan permasalahan-permasalahan yang telah diteliti sebelumnya

Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, analisis korelasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t yang akan diolah dengan menggunakan program SPSS.

Menurut Syakhrudin (2008), regresi linear sederhana (*simple regression*) ialah suatu bentuk persamaan regresi linear yang menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel yaitu satu variabel bebas (*independen*

variable) dengan satu variabel terikat (*dependent variabel*), dengan regresi fungsi garis lurus dengan bentuk persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Di mana:

Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Laba Penyertaan Modal pada BUMDa = konstanta (*intercept*)

b = Koefisien regresi variabel X

e = faktor pengganggu (*error term*)

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukotanya Meulaboh, sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha dan secara astronomi terletak pada 2° - 5°,16 Lintang Utara dan 95°,10° Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km. Sesudah pemekaran Meulaboh memiliki luas wilayah sebesar 292.795 Ha atau 2.927,95 Km² dan letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara agronomi terletak pada 04°61' - 04°47' Lintang utara dan 95° - 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.442,00Km² bujur sangkar.

Adapun secara administratif, wilayah Kabupaten Aceh Barat Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya , Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Naga Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya.

Jumlah Penerimaan Laba Penyertaan Modal pada BUMD di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan data perkembangan Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. Target dan Realisasi Laba Penyertaan Modal pada BUMDKabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2019

| No | Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan Persentase (%) |
|----|-------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2007 | 2,086,686,476 | 1,287,947,382 | 61,72 |
| 2 | 2008 | 2,324,027,562 | 1,558,645,286 | 67,07 |
| 3 | 2009 | 2,335,053,701 | 1,658,387,037 | 71,02 |
| 4 | 2010 | 2,993,230,076 | 2,993,230,076 | 100,00 |
| 5 | 2011 | 2,993,230,076 | 2,216,828,812 | 74,06 |
| 6 | 2012 | 2,522,369,293 | 2,522,369,293 | 100,00 |
| 7 | 2013 | 3,375,202,713 | 3,375,202,713 | 100,00 |
| 8 | 2014 | 3,375,202,713 | 3,687,870,750 | 109,26 |
| 9 | 2015 | 3,459,582,781 | 4,816,071,999 | 139,21 |
| 10 | 2016 | 4,785,619,099 | 4,785,619,099 | 100,00 |
| 11 | 2017 | 4,816,063,499 | 4,730,000,265 | 98,21 |
| 12 | 2018 | 4,928,126,688 | 4,928,126,688 | 100,00 |
| 13 | 2019 | 4,980,199,191 | 4,980,199,191 | 100,00 |

(Sumber : BPKD Aceh Barat)

Pada Tabel 4 dapat kita lihat bahwa target dan realisasi laba pada BUMD Kabupaten Aceh Barat beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012-2016 target selalu melebihi realisasi atau terealisasi sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah pada bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Aceh Barat hampir tergali keseluruhan serta pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat hampir mencapai angka optimal. Namun, pada tahun 2007-2009 realisasi tidak

mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2019 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 -2019

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Pertumbuhan Persentase (%) |
|----|-------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2007 | 21,212,667,763 | 21,710,256,581 | 102,35 |
| 2 | 2008 | 27,561,889,150 | 40,423,494,271 | 146,66 |
| 3 | 2009 | 26,909,471,261 | 27,874,493,673 | 103,59 |
| 4 | 2010 | 27,748,148,683 | 24,272,574,383 | 87,47 |
| 5 | 2011 | 33,117,259,546 | 21,042,866,954 | 63,54 |
| 6 | 2012 | 37,263,716,192 | 24,727,256,869 | 66,36 |
| 7 | 2013 | 48,329,547,197 | 46,928,106,802 | 97,10 |
| 8 | 2014 | 58,438,119,513 | 57,034,104,121 | 97,60 |
| 9 | 2015 | 29,269,645,097 | 36,794,486,818 | 125,71 |
| 10 | 2016 | 30,346,628,284 | 30,346,628,284 | 100,00 |
| 11 | 2017 | 35,445,628,384 | 35,445,628,384 | 100,00 |
| 12 | 2018 | 38,244,225,114 | 38,244,225,114 | 100,00 |
| 13 | 2019 | 42,142,327,211 | 42,142,327,211 | 100,00 |

(Sumber : BPKD Aceh Barat)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2010 – 2019 berfluktuasi. Pendapatan asli daerah tahun 2010 sebesar 11,17 persen, lalu naik sebesar 31,18 persen pada tahun 2011 dan 57,08 persen pada tahun 2012, kenaikan ini disebabkan karena kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak daerah baik pajak perorangan maupun pajak perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan PAD Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2013-2016 mulai menurun sebesar 83,13 persen hal ini disebabkan gejolak politik pada saat menjelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Kabupaten Aceh Barat dan disebabkan oleh sektor listrik dan air minum serta terjadi kesejangan pada sektor pertambangan di Kabupaten Aceh Barat .

Selanjutnya peneliti melakukan analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian dalam hal ini digunakan analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan uji t yang diolah melalui program komputer statistik atau program SPSS, dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan variabel independen laba penyertaan modal di Kabupaten Aceh Barat

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa adanya pengaruh antar penerimaan laba penyertaan modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 6. Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 16,218 | 5,443 | | 2,980 | 0,000 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L.P. Modal X | 0,369 | 0,249 | 0,407 | 3,479 | 0,002 |
| R Square | 0,766 | | | | |
| Adjusted R Square | 0,790 | | | | |

Sumber : Hasil Regresi (Januari 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana akhir estimasi sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = a + b \text{Ln}X + e$$

Persamaan regresi linear sederhana tersebut pada persamaan (4) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta. Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 16,218. Nilai konstanta ini menggambarkan apabila variabel dependen sama dengan nol maka tingkat PAD di Kabupaten Aceh Barat sebesar 16,218 persen.

b. Koefisien Regresi Laba Penyertaan Modal. Nilai koefisien untuk variabel independen dapat dijelaskan bahwa untuk variabel laba penyertaan modal hasil yang didapatkan bernilai positif yaitu sebesar 0,369. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel penerimaan laba penyertaan modal 1 persen, maka variabel PAD akan meningkat sebesar 0,369 persen.

Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Koefisien determinasi} = R^2 \times 100\%$$

$$\text{Koefisien determinasi} = (0,766) \times 100\%$$

$$\text{Koefisien determinasi} = 76,6 \%$$

Berdasarkan perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi pada tabel 4.4 dapat menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi *adjusted* bernilai 0,790 dan menghasilkan R^2 (*R square*) sebesar 0,766 yang dapat diartikan bahwa 76,6 persen dapat dijelaskan oleh variabel laba penyertaan modal sedangkan sisanya sebesar 23,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

| No | Uraian | t_{hitung} | t_{tabel} |
|----|-------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Laba Penyertaan Modal X | 3,479 | 2,201 |

Sumber : Hasil Regresi (Januari 2020)

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel laba penyertaan modal mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,479 > 2,201$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga secara individual variabel laba penyertaan modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi variabel independen (laba penyertaan modal X) diperoleh R Square secara positif menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap PAD (Y), karena apabila variabel laba penyertaan modal (X) baik maka PAD akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila variabel laba penyertaan modal kurang baik maka tingkat PAD akan menurun. Kemudian berdasarkan hasil output didapatkan bahwa variabel laba penyertaan modal mempunyai hubungan positif secara statistik dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,479 > 2,201$). Hasil yang didapat dalam penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Umaruddin Usman hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 19,651 artinya bilamana laba BUMD dianggap nol maka besar PAD Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 19,651, dan laba BUMD berpengaruh positif terhadap PAD Aceh Utara dengan besar koefisien 0,231 persen, artinya jika terjadi kenaikan pada laba BUMD sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap PAD sebesar 0,231 persen, hal ini bahwa PAD mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah, dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian secara individual variabel berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel laba penyertaan modal mempunyai hubungan positif dan signifikan ($0,002 < 0,050$) atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,479 > 2,201$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi penulis dapat menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted* bernilai 0,790 dan menghasilkan R^2 (*R square*) sebesar 0,766 yang dapat diartikan bahwa 76,6 persen dapat dijelaskan oleh variabel laba penyertaan modal sedangkan sisanya sebesar 23,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Referensi

- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 71-79.
- Alisman, A., Sufriadi, D., & Fandi, D. Y. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 68-75.
- Bayu Pratama Putra. 2015. *Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010- 2015*. Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
- Hanif, U., & Sufriadi, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 8(2), 116-124.
- Mamesah, Marline Merke & Kusmaningtyas, Amiartuti. 2009. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Sector Public, Vol. 5, No. 3.
- Mardiasmo, 2007. *Perpajakan Indonesia Revisi 2000*, penerbit Andi Yogyakarta. Pratiwi 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Riduansyah Muhammad, 2007. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Vol. 7, No. 2. Makara, Sosial Humaniora.
- Rohcmani siti Tanti, Purwaningsih Yunastiti dan Suryantoro Agustinus, 2016. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah*, JEP Vol.16 No 2.
- Sari Anita Rini dan Husaini Muhammad, 2015. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tempe di Kabupaten Tulang Bawang Periode 2009-2013*. JEP Vol. 4, No 2.
- Sastrohadiwirjo, 2006. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, edisi 2. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Syahrial dan Sotuyo, 2014. *Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe*. Vol.3 No.5. Jurnal Kebangsaan.
- Wandosa Derek Hengki, Arius Kambu dan Agustinus Numberi, 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika*. Jurnal Kedua Vol. 2 No. 3. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Pendapatan Negara.